

REKONSTRUKSI EKOFEMINISME SEBAGAI ETIKA PERILAKU DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM KOTA

RECONSTRUCTION OF ETHICAL BEHAVIOR AS ECOFEMINISM IN ECOSYSTEM MANAGEMENT CITY

Farid Aulia

Universitas Al-Azhar Medan
Jalan Pintu Air Kwala Bekala Medan
Email: faridaulia79@gmail.com

Abstrak: Ekofeminisme merupakan sebuah gagasan yang muncul dari realitas keibuan seorang perempuan yang bersifat intuitif, bekerjasama, memelihara serta merawat. Kemunculan gagasan ini menjadi jawaban atas dualisme dan reduksionisme dari ilmu pengetahuan modern yang menempatkan secara terpisah antara obyek-subyek, manusia-alam semesta, akal-rasa dan laki-laki-perempuan.. Kerekatan hubungan manusia dengan alam pada wilayah perkotaan diperlakukan secara terpisah. Masyarakat kota mereduksi variabel-variabel perilaku dalam perhitungan yang sistemik, modern dan terstruktur. Perilaku manusia didorong oleh hegemonitas kota yang agresif, konsumtif, kompetitif, rasional dan dominatif, sehingga pengelolaan ekosistem kota diperlakukan tidak ubahnya obyek yang diperlakukan sesuai kehendak yang dituju. Paradigma ekofeminisme berusaha menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan modern dengan etika perilaku yang selama ini bersumber pada tatanan nilai-nilai kearifan ekologi (ecology wisdoms) yang terpinggirkan atas nama pembangunan dan modernisasi. Diskursus penggantian ilmu pengetahuan modern ke dalam relung kehidupan masyarakat kota mengalami pergerakan yang begitu akseleratif dan dinamis. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur melalui penelaahan kasus-kasus degradasi dan deforestasi ekosistem kota dengan menggunakan konsep dan teori ekofeminisme yang relevan sebagai pisau analisis untuk membedahnya. Ekofeminisme beralih pada ajakan untuk melestarikan kualitas lingkungan dalam pengelolaan ekosistem kota agar dunia menjadi seimbang dan segala kerusakan lingkungan dapat dikurangi.

Kata kunci: Ekofeminisme, Modernisasi, Kearifan Ekologi, dan Ekosistem Kota.

Abstract: Ecofeminism is an idea that emerged from the reality of motherhood a woman who is intuitive, collaboration, nurturing and caring. The emergence of this idea became the answer to dualism and reductionism of modern science are separately placed between the object-subject, the human-universe, sense-sense and male-female. Adhesiveness of human relationships with nature in urban areas are treated separately. Urban communities to reduce the variables in the calculation of the systemic behavior, modern and structured. Human behavior is driven by the city Hegemonitas aggressive, consumerist, competitive, rational and dominating, so the city ecosystem management objects are treated no different than the destination will be treated accordingly. Paradigm ecofeminism attempt to bridge the gap between modern science with ethical behavior has been derived in the framework of the values of ecological wisdom (ecology wisdoms) are marginalized in the name of development and modernization. Replacement discourse of modern science into the recesses of the urban experience and the accelerated movement so dynamic. Other research method used is a review of the literature through the study of cases of urban ecosystem degradation and deforestation by using concepts and theories relevant ecofeminism as a knife to cut her analysis. Ecofeminism switch on call to preserve environmental quality in urban ecosystem management for the world to be balanced and any damage to the environment can be reduced.

Keywords: Ecofeminism, Modernization, Ecological Wisdom, and City Ecosystem.

PENDAHULUAN

Penurunan kualitas bahkan kerusakan lingkungan hidup perkotaan akhir-akhir ini menjadi keperhatian serius. Bencana alam yang datang silih berganti merupakan cerminan dari aktivitas manusia yang tidak terkendali. Manusia sebagai makhluk penghuni alam semesta ini merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Karunia akal seharusnya menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sentral dalam menciptakan ekosistem perkotaan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukkan yang dituju. Euforia akan pemenuhan kebutuhan manusia semakin terlarut pada tatanan yang mengharuskan manusia bertindak konsumtif dan eksploitatif. Menghadirkan gagasan filosofis terkait dengan interaksi manusia dengan alam masih tetap relevan untuk disuarakan. Dampaknya mungkin tidak selalu bersifat praktis-fungsional, namun tetap urgen bagi upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran bersama betapa urgen dan mendesaknya agenda-agenda penyelamatan lingkungan kota agar kelestariannya tidak semakin terancam.

Salah satu ancaman dari pembangunan kota yang terlupakan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak berwawasan lingkungan. Seiring kemajuan teknologi yang berkembang, banyak sekali kemudahan yang bisa kita nikmati. Namun dampak negatif yang muncul juga tidak sedikit, terlebih lagi terhadap lingkungan tempat kita bernaung saat ini. Harus kita sadari bersama-sama bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang termanifestasi dalam pembangunan multi sektoral tanpa mempertimbangkan eksek yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup, suatu saat akan menjadi bumerang bagi kelangsungan hidup manusia. Meningkatnya kebutuhan manusia terhadap sumberdaya lahan perkotaan untuk pemenuhan hasrat kebutuhan manusia hidup lebih layak, maupun peningkatan jumlah penduduk yang berakibat pada peningkatan kebutuhan ruang dapat menyebabkan gangguan keseimbangan ekosistem kota. Kondisi ini terjadi akibat ulah dari masyarakat kota (pemerintah, swasta, penduduk) yang mengeksploitasi sumberdaya alam untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tanpa berpikir keseimbangan ekosistem kota.

Khasanah perkembangan ilmu pengetahuan modern didorong untuk melahirkan gagasan-gagasan inovatif terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan berdalih pada kemaslahatan umum, proses pemanfaatan sumber daya alam seolah menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar lagi, meskipun bertolak belakang dengan nilai-nilai konservasi. Bahkan tidak sedikit kasus pemanfaatan sumberdaya alam berujung pada tindakan eksploitasi yang justru mengakibatkan alam kian terdegradasi. Lingkungan ditempatkan pada dimensi ekonomis yang bermanfaat jika memiliki nilai tambah. Peranan ilmu pengetahuan modern demikian penting untuk memunculkan nilai tambah tersebut. Indikator keberhasilan merujuk pada seberapa besar pemanfaatan itu mampu menciptakan produk yang bernilai tambah, sehingga wacana konservasi mendapat perhatian yang lebih rendah jika hal itu berbenturan dengan kepentingan pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

Berbagai kawasan hutan di Indonesia telah menjadi sasaran peningkatan nilai ekonomis hutan. Konversi areal hutan heterogen menjadi tanaman industri, alih fungsi hutan menjadi areal pertambangan, pembakaran hutan untuk perkebunan kelapa sawit merupakan bukti konkret dari perilaku manusia yang menempatkan keuntungan ekonomis menjadi sentra utama. Padahal jika dibandingkan dengan eksek negatif yang muncul dari tindakan ini tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Bahkan selisih kerugian ekonomis yang akan ditanggung jauh lebih besar ketimbang keuntungan yang diperoleh. Belum lagi perhitungan non ekonomis yang diderita oleh masyarakat lokal akibat bencana alam, seharusnya menggugah keprihatinan kita untuk segera merubah paradigma dalam memandang kebermanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan manusia.

Ekofeminisme berusaha menjembatani kesenjangan paradigma sains modern yang mengandung aspek maskulinitas dan patriarkis dan eksploitatif menuju pada tatanan kehidupan yang lebih seimbang. Untuk itu, penelitian ini menjadikan paradigma ekofeminisme sebagai landasan bagi etika perilaku dalam pengelolaan ekosistem kota. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana paradigma matrealistik-reduksionistik dapat mendorong manusia untuk berperilaku konsumtif dan eksploitatif yang bersumber dari bekerjanya paradigma sains modern, 2) bagaimana paradigma ekofeminisme yang dibangun atas landasan etika perilaku dapat menciptakan tatanan kehidupan yang berkeadilan secara ekologis dalam pengelolaan ekosistem kota. Sementara tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan bekerjanya paradigma matrealistik-

reduksionistik yang bersumber dari paradigma sains modern dapat mendorong manusia untuk berperilaku konsumtif dan eksploitatif, 2) untuk menganalisis secara lebih jelas pandangan ekofeminisme tentang relasi antara manusia dengan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan yang menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

METODE

Penelitian ini berupa uraian konsep, gagasan dan teori dari para ekofeminisme yang memiliki korelasi dengan pengelolaan ekosistem kota sebagai etika perilaku manusia dalam mencegah dan mengurangi degradasi, deforestasi serta pencemaran yang ditimbulkan dari aktivitas manusia. Sumber data penelitian berasal tinjauan kepustakaan yang berasal dari buku, jurnal, buletin yang berisi kajian ekofeminisme tentang etika perilaku yang terkait dengan kajian, kebudayaan, gender dan filsafat sosial dalam pengelolaan ekosistem kota. Analisis digunakan simultan dengan menggunakan metode *on going analysis* yang dipadukan dengan konsep ekofeminisme dan ekosistem kota. Setiap informasi baru ditarik inferensinya untuk mempertajam analisis berikutnya (Moleong, 2000).

PEMBAHASAN

Materialistik-Reduksionistik: Melahirkan Perilaku Eksploitatif

Salah satu landasan filosofis yang berpengaruh dalam mengembangkan perilaku eksploitatif dan konsumtif manusia bersumber dari terkonstruksinya paradigma sains modern yang melahirkan paradigma materialistik-reduksionistik. Meskipun sistem berpikir ini lahir di awal abad yang lalu, namun tetap relevan untuk dibahas dalam kondisi lingkungan dunia yang mengkhawatirkan seperti saat ini. Filosof Alfred North Whitehead mencoba melakukan revitalisasi terhadap tradisi ontologi yang dianggap mengalami kebangkrutan seiring semakin dominannya paradigma keilmuan modern yang semata bertumpu pada ontologi materialisme. Whitehead meyakini bahwa materialisme ilmiah telah menjadi cikal-bakal lahirnya dominasi manusia atas alam semesta yang dibawa melalui jargon *developmentalism*. Watak eksploitatif bersifat imanen, karena melihat dunia hanya sebagai gugusan materi yang statis, sehingga dapat dikalkulasi secara eksak serta dapat direkayasa secara linier melalui *developmentalism* (Fakih, 1996).

Bahkan Fakih (1996) secara tegas menyebutkan bahwa pelembagaan yang dilakukan hampir semua Universitas di Barat yang mengkaji tentang *Development Studies* ikut serta dalam penyebarluasan diskursus pembangunan dengan berjejaring melalui lembaga dana internasional, lembaga penelitian dan badan perencana pembangunan yang secara terfokus menentukan apa yang harus dibicarakan, dipikirkan, diidamkan untuk mencapai gagasan *developmentalism* dan modernisasi. Untuk konteks Indonesia, pembangunan dilaksanakan melalui mekanisme kontrol ideologi yang ketat dan canggih di seluruh aspek kehidupan, mencakup: sosial, budaya, ekonomi dan politik (Fakih, 1996).

Peletakkan gagasan-gagasan pembangunan yang tersusun rapi dalam aneka kebijakan bukan semata dilatar belakangi keinginan untuk menyejahterakan rakyat, tetapi hanya sekedar membuat Dunia Ketiga tergantung pada Dunia Pertama. Sehingga, teknik rekayasa dan manipulasi digunakan untuk menyingkirkan partisipasi aktif masyarakat, dalam kehidupan sosial (Fakih, 2001). Perkembangan kebudayaan melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan telah menggeser tradisi kehidupan dan pikiran manusia. Selama ini mitos terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai unsur yang universal, bebas nilai dan objektif pada dasarnya sangat berakar pada cara pandang yang positivistik dan patriarkis. Ilmu pengetahuan direduksi agar terjadi keseragaman dalam hal pendekatan, di mana hanya ada satu cara penyelesaian dan tidak mentolerir cara lain. Reduksionisme telah menggusur kemampuan alam untuk bereproduksi dan menggantikannya dengan teknologi, seperti halnya pembangunan menggusur kelompok masyarakat sebagai ahli dalam kearifan ekologi (*ecology wisdoms*).

Pengelolaan Ekosistem Kota dalam Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan ekosistem kota berfungsi sebagai dasar kebijakan yang mutlak dalam menetapkan kebijakan pembangunan secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan ditujukan tidak hanya bagi perlindungan lingkungan dan masyarakat, tetapi pemerintah berkewajiban dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang bertujuan mengedepankan fungsi lingkungan hidup dan kesamaan derajat antar generasi serta menumbuhkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban dari *stakeholder* secara keseluruhan dalam melindungi dan melestarikan lingkungan hidup secara terpadu (Kadir, 2005).

Harus disadari bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi itu ada batasnya, dimana perekonomian yang bertumpu pada ekstraksi sumberdaya alam tidak akan bertahan lama. Pertumbuhan ekonomi yang demikian pesatnya tidak berarti apa-apa jika degradasi lingkungan yang ditimbulkan ikut diperhitungkan dalam pendapatan nasional. Oleh sebab itu, kombinasi antara aspek ekologis dan ekonomis menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi dalam perumusan kebijakan nasional. Pada tataran implementasi dan aplikasi, pemerintah bersama-sama rakyat ikut bertanggungjawab tidak hanya terhadap degradasi lingkungan, tetapi juga terhadap kebijakan publik yang mengakibatkan kerusakan lingkungan (Arifin, 2001). Ekosistem kota bukan saja merupakan konsentrasi dari semua aspek kegiatan kehidupan manusia. Berbagai faktor dapat menimbulkan dampak terhadap keberadaan ekosistem kota berupa kemacetan-kemacetan di segala bidang dan pencemaran. Selain itu juga berbagai permasalahan yang muncul, seperti urbanisasi yang berakibat pada kemiskinan, penurunan derajat dan kualitas kesehatan, pendidikan yang rendah, transportasi yang tidak lancar, kekumuhan lingkungan pemukiman dan sebagainya.

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan kemitraan untuk saling memahami dan saling percaya yang konstruktif di antara berbagai stakeholder demi menjamin lingkungan hidup menjadi bagian integral dari keseluruhan proses pembangunan. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan disesuaikan dengan kondisi ekologi di masing-masing negara dan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di pihak lain. Sasaran yang hendak dicapai untuk membangun masyarakat lokal memiliki sumber penghidupan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan. Masyarakat lokal dapat mengembangkan kehidupan ekonominya, mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapinya, tetapi juga mampu menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan ekosistem dalam sebuah keterkaitan yang saling mendukung.

Transformasi Paradigma Menuju Ekofeminisme

Diskursus tentang ekofeminisme ditujukan pada peran kaum perempuan dan rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan yang tidak mampu bersaing dengan laki-laki. Aspek maskulinitas berusaha ditransformasi ke dalam kehidupan perempuan yang terkonstruksi dengan pencitraan sebagai sosok feminin. Pengabsorpsian kualitas maskulin ke dalam kehidupan kaum perempuan ditunjukkan dengan penggunaan teknologi dan kebijakan yang sulit menerima interupsi dan kritik. Diasumsikan serupa dengan rasionalitas laki-laki barat kulit putih yang mendominasi, berdasarkan linear, dikotomi melalui pola-pola yang memisahkan realitas menjadi dualisme; di mana yang satu dianggap lebih baik dan lainnya buruk. Pihak yang satu lebih superior lainnya inferior, satu harus mendominasi dan lainnya harus dieliminasi atau ditekan (Darmawati, 2002). Kondisi ini menjadi totalitas dalam konstruksi sosial budaya yang terhubung dengan peran-peran sosial yang dilakoni dalam relasi perempuan dan laki-laki. Dalam sejarah kajian gender, pencitraan kualitas feminin dianalogikan dengan alam, sementara pencitraan kualitas maskulin kerap bersanding dengan budaya yang serta-merta menguasai alam. Oleh karena itu, segala hal yang berhubungan dengan alam selalu didekatkan dengan nilai-nilai kelembutan, pengorbanan, kasih sayang, perlindungan dan kelestarian. Justru dengan budaya manusia dapat mengatur dan menguasai alam (Megawangi, 1999).

Alam dipersonifikasi sebagai sosok perempuan, gadis ningrat, ibu kandung yang mempunyai otoritas pengaturan. Namun, alam justru yang tereduksi oleh manusia untuk selalu dikontrol dan diatur karena dinilai sebagai hal yang mencerminkan kondisi sosial perempuan dalam konteks relasi gender (Darmawati, 2002). Pencitraan kualitas maskulin dalam kehidupan laki-laki berusaha memerangi realitas keibuan, realitas tubuh dan alam yang dianggap harus senantiasa dikendalikan oleh laki-laki. Melalui ilmu pengetahuan, pencitraan maskulinitas memaksakan transedensinya terhadap alam. Tubuh organis alam seketika dirubah menjadi mesin yang dibentuk dan dijalankan dari luar dengan alasan-alasan pembenahan. Lewat ilmu pengetahuan dan teknologi semua mimpi-mimpi

berusaha diwujudkan dengan memanipulasi kandungan material alam sebanyak mungkin untuk digunakan manusia. Dengan kata lain, kemunculan antroposentrisme mendominasi terhadap kedudukan alam yang kerap dilihat sebagai sistem ekspansi tidak terbatas (Darmawati, 2002). Hampir semua kebudayaan mengenal dan membuat perbedaan antara manusia dengan alam. Ortner (1974) berpendapat, kebudayaan berusaha mengontrol dan menguasai alam untuk memanfaatkannya demi kepentingan sendiri. Seperti perempuan yang diidentifikasi secara simbolis dengan alam. Sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan kebudayaan, maka kebudayaan berusaha mengontrol dan menguasai alam. Oleh karena itu, citra feminin yang melekat pada diri perempuan harus juga dikontrol dan dikuasai karena pertautannya yang erat dengan alam semesta (Moore, 1998).

Namun pelakon feminin-maskulin tidak berlaku universal pada pencitraan perempuan dan laki-laki. Margaret Mead dalam Tampubolon (2004) telah membuktikannya melalui kajian antropologinya di New Guinea. Mereka menemukan bahwa pencitraan feminin-maskulin merupakan ciri-ciri kepribadian yang dikaitkan dengan jenis kelamin yang tidak selalu sama. Oleh karena pakaian, tata krama dan hiasan-hiasan kepala menjadi simbol-simbol yang diberikan masyarakat kepada jenis kelamin tertentu. Perbedaan kepribadian dalam pencitraan diri tersebut tidak bersifat universal pada seluruh perempuan dan laki-laki, namun tergantung pada konteks budaya masyarakat setempat. Transformasi maskulinitas ke dalam aspek feminitas memunculkan pembentukan watak anti-*nature* yang secara perlahan bisa mengurangi rasa hormat pada alam. Terjadinya pemisahan yang cukup mendalam antara jiwa, rasio dan badan. Manusia dan lingkungan ibarat jiwa, rasio dan badan yang selalu dikendalikan, dikontrol seperti perempuan yang selalu identik dengan alam. Ketika alam dan kebudayaan bersanding dalam dualisme tradisional, alam seolah dilekatkan pada kutub negatif yang harus terus didominasi, dipakai serta dikontrol manusia.

Interaksi yang terjalin antara Orang Papua lingkungannya. Interaksi ini mencerminkan pertautan aktivitas ekonomi dengan pengalaman beragamnya. Puisi-puisi mereka mengisahkan aksi memeluk pohon-pohon untuk mencegah para suami yang bekerja sebagai kontraktor hutan agar tidak menebang pohon-pohon di dalam hutan (Darmawati, 2002). Demikian juga aksi perempuan-perempuan India di Kota Reni, bagian utara India. Melalui gerakan *chipko*, mereka bersepakat untuk menghentikan kegiatan penebangan hutan dengan memeluk erat pohon-pohon yang akan ditebang dengan mesin pemotong kayu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Gerakan ini berhasil menyelamatkan sebanyak 12.000 km areal hutan (Arivia, 2002)¹.

Disinilah penolakan Shiva terhadap proyek korporasi global yang melakukan rekayasa biologi terhadap sejumlah jenis tanaman produktif. Penolakan itu mencerminkan demikian arifnya pandangan Shiva terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang turut menghancurkan sejumlah kearifan lokal mengenai sistem pengelolaan sumber daya alam. Pengetahuan tentang tata cara pengelolaan sumber daya alam tradisional yang arif terhadap lingkungan dilekatkan pada stereotipe kuno, tidak modern, kurang bagus dan tidak ilmiah serta jauh dari nilai-nilai produktif. Atas nama pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kearifan *chipko* diberangus demi pengadopsian berbagai teknologi modern.

Namun kesadaran perempuan akan makna hakiki tersebut semakin mendorongnya dalam pengidentifikasian diri sebagai bagian dari alam semesta. Manusia dan lingkungan ibarat sebuah pohon, apa pun yang terjadi di rantingnya tentu akan dirasakan oleh seluruh organ-organ yang ada di pohon². Nilai-nilai kepedulian, kesatuan, pemeliharaan, perlindungan dan cinta kasih ini merupakan sekumpulan kualitas feminin yang secara intrinsik melekat pada diri perempuan sebagai anugerah. Meskipun demikian, bukan berarti di dalam diri laki-laki tidak mempunyai kualitas feminin, karena

¹ Gerakan *chipko* berlandaskan unsur ekonomi dan budaya. Unsur ekonomi karena adanya sentiment terhadap kontraktor-kontraktor besar yang menggunduli hutan mereka untuk kepentingan bisnis. Sementara unsur budaya menyangkut pemaknaan hutan dengan makna sacral yang dikenal dengan sebutan Aranya Sanskrit. Gerakan ini memiliki basis ekologi yang kuat dan punya perspektif perempuan yang telah dikorbankan demi kepentingan bisnis.

² Pernyataan di atas dikutip dalam tulisan Farid Aulia (2008) "Gagasan Ekofeminisme dalam Pelestarian Lingkungan", dalam Majalah Sarana Berita Wanita (SARITA), Kantor Biro Pemberdayaan Perempuan Propinsi Sumatera Utara edisi IV Tahun II- April 2008.

pada tataran batin di luar tataran lahiriah setiap manusia memiliki potensi serba dua yang sama untuk dapat mengembangkan kedua kualitas tersebut, baik feminin maupun maskulin (Aulia, 2008).

Sikap diri yang lahir sebagai akibat dari proses pembentukan kualitas feminin sangat dipengaruhi oleh bagaimana paradigma kita terhadap dunia. Rasa kepedulian, pemeliharaan, kesatuan, kelangsungan hidup dan keutuhan akan ciptaan Tuhan tidak bisa terbentuk jika paradigma yang dipakai terhadap bumi dan sesama makhluk hidup tidak berubah. Paradigma ekofeminisme haruslah menjadi *mainstreaming* yang senantiasa diperjuangkan sebagai pertahanan terhadap dominasi maskulinitas yang bersemai dalam ekspansi kapitalisme global. Menggunakan paradigma pertumbuhan ekonomi sebagai jargon dalam setiap kebijakan mencari kemakmuran sebesar-besarnya telah menampakkan kegagalannya. Potret kemiskinan, ketimpangan relasi gender, pencemaran, peminggiran hak-hak komunitas adat, perampasan pengelolaan sumberdaya alam sebagai buktinya. Sudah saatnya ekofeminisme menjadi paradigma untuk menyebarkan sikap kepedulian, pemeliharaan, perlindungan, cinta kasih, semangat berbagi dalam membangun solidaritas antar sesama makhluk hidup yang menjadi penghuni bumi ini.

Rekonstruksi Ekofeminisme Sebagai Etika Perilaku

Istilah ekofeminisme merujuk pada sebuah gerakan di dalam feminisme yang berpandangan bahwa patriarki yang berujung pada pembentukan budaya konsumerisme pada dasarnya menghancurkan alam (*nature*) dengan mengatasnamakan keuntungan (*profit*), penumpukan kapital dan kemajuan. Kemunculan gerakan ini diawali karena ketidakpuasan terhadap arah perkembangan ekologi dunia yang semakin carut-marut (Megawangi, 1999). Hal ini dilatar belakangi perebutan materi dan status dalam komoditi terbatas yang senantiasa diperebutkan. Pada akhirnya perebutan menjadi sebuah wacana kompetisi, *self-centered*, menurunnya solidaritas sosial, meningkatnya kriminalitas, dominasi dan eksploitasi terhadap alam dapat memudahkan hasrat cinta, pengasuhan, perlindungan dan pemeliharaan yang bersemai dalam kualitas feminin.

Perkembangan ilmu pengetahuan memperbesar keinginan manusia untuk menguasai, mendominasi dan mengeksploitasi alam yang berakibat pada kerusakan alam, terjadinya polusi dan deforestasi. Sehingga, pada tahun 1980-an fokus perhatian para feminis beralih pada ajakan untuk melestarikan kualitas feminin agar dunia menjadi seimbang dan segala kerusakan lingkungan dapat dikurangi. Kunci untuk memperbaiki alam terletak pada penghormatan hukum alam yang dipahami oleh masyarakat tradisional yang menganggap alam sebagai guru terbaik yang dapat membangkitkan pola hidup sederhana, rendah hati, murni, benar dan cinta kasih (Darmawati, 2002: 15). Pendekatan ini berbeda dengan kajian teori-teori feminisme modern yang berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang terlepas dari pengaruh lingkungannya. Teori-teori ekofeminisme melihat eksistensi individu menjadi bagian dari lingkungan. Kesadaran untuk melihat diri manusia sebagai hal yang menyatu dengan lingkungan merupakan esensi dari penghapusan kesadaran akan kedirian manusia sebagai makhluk otonom dan terpisah.

Rekonstruksi paradigma ekofeminisme dilakukan dengan cara mengungkap dan merumuskan ide-ide dasar yang menjadi fondasi dalam menjalin relasi dengan sesama maupun dengan seluruh isi alam. Setidaknya menurut Suliantoro (2011), ada beberapa prinsip etis yang harus dikembangkan ekofeminisme dalam upaya melestraikan lingkungan yaitu:

a. Bertanggung Jawab Terhadap Keutuhan Biosfer.

Ekofeminisme mengajak masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran mendalam dan permanen bahwa dirinya merupakan bagian dari unsur biosfer yang diberi tanggung jawab mewujudkan harmoni yang maksimal antar seluruh unsur kosmis. Sikap moral bertanggung jawab mencakup dua aspek, yaitu tanggung jawab terhadap mutu/ kualitas biosfer dan tanggung jawab keberlangsungannya. Bertanggung jawab terhadap mutu/ kualitas biosfer dalam artian apabila tidak mampu untuk semakin meningkatkan mutu atau kualitas biosfer, minimal. Sementara itu, tanggung jawab terhadap keberlangsungan dalam artian hendaknya jangan demi kepentingan pribadi melakukan perbuatan yang berakibat mengganggu atau merugikan lingkungan, membahayakan orang lain maupun mengurangi kualitas hidup generasi mendatang.

b. Solidaritas Kosmis

Dibidang etika lingkungan, sikap solidaritas diperluas cakupannya tidak hanya dalam relasi antar manusia, melainkan juga mencakup semua unsur yang ada di alam (kosmis), dan tidak hanya bagi generasi sekarang, melainkan juga bagi generasi mendatang. Solidaritas kosmis mendorong

manusia mengambil sikap pro-alam, pro-lingkungan dan menentang tindakan yang merusak lingkungan (Keraf, 2006). Sikap solidaritas yang kuat menghasilkan rasa simpati dengan sesama maupun generasi mendatang. Simpati merupakan mekanisme psikologis dimana seseorang menempatkan diri secara imajinatif ke dalam posisi orang lain untuk bisa melihat, menangkap dan memahami orang yang akan terkena akibatnya.

c. Menjaga Keselarasan dengan Alam

Prinsip keselarasan melarang orang bertindak atas dasar dan pertimbangan egoismenya semata. Ekofeminisme sangat menekankan perlunya mengakhiri logika dominasi yang saling beradu kekuatan dan mulai membangun solidaritas dengan seluruh penghuni kosmos sehingga setiap penghuni merasa aman, nyaman dan damai tinggal bersama. Berelasi dengan alam hendaknya bukan untuk mencari kemenangan tetapi ketentraman.

d. Menjalin Relasi Setara

Konsep kesetaraan (egalitarian) ini tidak terjebak pada sikap egalitarian yang naif yang menempatkan kedudukan sama persis antar unsur kosmis. Sikap egalitarian yang dimaksud oleh kaum ekofeminisme disini tidak dalam artian menempatkan kedudukan yang sama persis antara manusia dengan makhluk non-manusia. Perjuangannya bukanlah “perlakuan sama”, tetapi “kesamaan untuk dipertimbangkan” (*equality of consideration*). Prinsip egalitarian dalam perspektif ekofeminisme mengandaikan berbagai keinginan, aspirasi dan kepentingan semua pihak diakomodasi secara proporsional. Prinsip egalitarian dalam relasi manusia dengan alam memiliki pengertian bahwa pengambilan keputusan berdimensi moral bukan hanya memperhitungkan kepentingan manusia saja, melainkan mempertimbangkan juga kepentingan pihak-pihak non-manusia.

e. Kepedulian

Kepedulian terhadap lingkungan yang diperjuangkan tokoh ekofeminis Vandana Shiva memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang diperbuat agar dunia ini menjadi suatu tempat yang lebih baik untuk didiami, tidak peduli betapapun kecilnya sumbangan itu.

f. Kesederhanaan

Prinsip kesederhanaan merupakan kemampuan mengendalikan diri terhadap hal-hal yang bersifat kenikmatan lahiriah. Prinsip kesederhanaan menentang sikap egoisme dan kerakusan manusia dalam memanfaatkan apa yang tersedia di alam. Gaya hidup rakus mengumpulkan harta dan kekayaan sebanyak-banyaknya harus ditinggalkan. Prinsip kesederhanaan sangat menunjang bagi kelestarian ekosistem. Prinsip kesederhanaan dapat berfungsi untuk menekan gaya hidup manusia modern yang bersikap konsumtif, eksploitatif, hedonis, rakus dan tamak. Prinsip kesederhanaan tidak berarti manusia tidak boleh memanfaatkan hasil dari suatu ekosistem, melainkan perlu bersikap hati-hati dan tetap menjaga agar tidak terjadi kepunahan.

Meluncurnya paradigma ekofeminisme bukan hanya menjadi pertanda bahaya bagi peminggiran hak-hak perempuan saja, melainkan juga pertanda bagi terpinggirkannya hak-hak kaum miskin, anak-anak, masyarakat dunia ketiga dan tentu saja alam semesta. Ekofeminisme lebih dari sekedar menggabungkan penyelamatan lingkungan dengan memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia, melainkan juga meliputi seluruh kompleksitas persoalan yang dihadapi manusia dari persoalan kemiskinan, kelaparan, bencana alam, penolakan privatisasi, penghapusan utang, anti rekayasa gentika dan plasma nutfah yang kesemuanya bermuara pada penolakan kapitalisasi pasar bebas.

KESIMPULAN

Paradigma ekofeminisme merupakan kategori inklusif yang tidak hanya bertumpu pada pembagian berdasarkan satu jenis kelamin. Dengan kata lain, bersemayamnya paradigma ini tidak memandang laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma ekofeminisme hendaknya menjadi arus utama (*mainstreaming*) dalam setiap kebijakan pembangunan. Hasil yang dicapai menjadi tidak optimal, jika pencitraan kualitas maskulin dan patriarkis tetap mendominasi dalam implementasi pembangunan yang strategis. Perlu adanya perubahan paradigma dalam memandang alam dan lingkungan tempat manusia hidup dan berkembang biak. Pemerintah

hendaknya melakukan reformulasi kebijakan pembangunan di semua bidang kehidupan untuk merubah paradigma yang konsumtif, mendominasi dan eksploitatif menjadi paradigma ekofeminis yang melindungi, memelihara, cinta kasih dan semangat berbagai dalam membangun solidaritas. Dengan demikian kemiskinan, ketimpangan relasi gender, pencemaran, peminggiran hak-hak komunitas adat, perampasan pengelolaan sumberdaya alam perlahan-lahan dapat tergusur ke dalam semangat kepedulian, pemeliharaan, perlindungan, cinta kasih dan saling berbagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis. "Ekofeminisme: Lingkungan Hidup Berurusan Dengan Perempuan." Jurnal Perempuan edisi Perempuan dan Ekologi 21 (2002): 15-17 .
- Aulia, Farid. "Gagasan Ekofeminisme Dalam Pelestarian Lingkungan." Majalah Sarana Berita Wanita. Kantor Biro Pemberdayaan Perempuan Propinsi Sumatera Utara edisi IV Tahun II – April (2008): 24-27.
- Darmawati, Intan. 2002. "Dengarlah Tangisan Ibu Bumi! Sebuah Kritik Ekofeminisme Atas Revolusi Hijau." Jurnal Perempuan edisi Perempuan dan Ekologi 21 (2002): 23-27.
- Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar. 2001.
- Kadir, Abdul. "Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan." Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau 1 (2005): 27-32.
- Keraf, A.S. Etika Lingkungan. Jakarta: Kompas, 2006.
- Megawangi, Ratna. Mebiarkan Berbeda. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Moleong, Lexi. J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Moore, Henrietta L. Feminisme dan Antropologi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998
- Suliantoro, Wibowo. B. "Rekonstruksi Pemikiran Etika Lingkungan Ekofeminisme Sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari". Jurnal Bumi Lestari 11 (2011): 112-117.
- Tampubolon, Lantur, H. Seksualitas Dari Perspektif Antropologi. Dalam Seksualitas: Teori dan Realitas. Hidayana, Irwan M, dkk (ed). Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI dan Ford Foundation. Jakarta, 2004.